

ABSTRAK

Wildan Mei Sadintri : *Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Maja Selatan Kabupaten Majalengka Perspektif Siyasah Maliyah.*

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah salah satu pemasukan daerah yang cukup besar bagi keuangan daerah. Hal tersebut dihasilkan dari sebagian hak-hak individu tiap penduduk di suatu daerah. Oleh karena itu, pemanfaatannya harus sesuai dengan apa yang menjadi hajat atau kebutuhan masyarakat. Terutama dalam urusan pembangunan, masyarakat daerah sangat bergantung kepada ketepatan dan kebijaksanaan pemerintah daerah dalam mengalokasikan dana. Namun pada kenyataannya di lapangan, penulis menemukan adanya indikasi ketidaksesuaian dalam pemanfaatan dana PBB.

Tujuan penelitian ini adalah: *Pertama*, untuk Mengetahui landasan hukum Pajak Bumi dan Bangunan dalam Hukum Tata Negara Islam dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia. *Kedua*, untuk mengetahui pemanfaatan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Maja Selatan Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka. *Ketiga*, untuk mengetahui bagaimana politik hukum ekonomi Islam tentang pemanfaatan Pajak Bumi dan Bangunan untuk pemabngunan di Desa Maja Selatan menurut tinjauan siyasah Maliyah.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teori implementasi kebijakan untuk meneliti pemanfaatan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Maja Selatan. Selain itu juga menggunakan teori hukum islam untuk mengetahui pemanfaatan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Maja Selatan dalam sisi atau sudut pandang islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan mengenai pelaksanaan serta pemanfaatan pajak bumi dan bangunan di Desa Maja Selatan Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka dan menarik kesimpulan dari hasil analisis tentang pelaksanaan serta pemanfaat desa pajak bumi dan bangunan di Desa Maja Selatan Kecamatan Maja. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

Penelitian ini menyimpulkan (1) Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Maja Selatan Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka telah sesuai dengan Hukum Tata Negara Islam dan nPeraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia. (2) Pada pelaksanaan pemanfaatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan di desa Maja Selatan Kecamatan Maja, terdapat faktor penghambat, yaitu banyaknya masyarakat yang kurang terlibat secara aktif terhadap segala kegiatan dalam pemerintahan desa. Serta adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan sebagian besar program kegiatan pemerintahan desa menjadi terhambat. (3) Menurut perspektif siyasah maliyah, pelaksanaan pemanfaatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan di desa Maja Selatan Kecamatan Maja sesuai dengan prinsip-prinsip siyasah maliyah demi tercapainya suatu kemaslahatan.

Kata Kunci: Peraturan daerah nomor 13 tahun 2019, Politik Hukum Ekonomi Islam, dan Siyasah Maliyah.